

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Perbankan Indonesia

Sejarah perkembangan bank di Indonesia dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan. Banyak hal yang terjadi hingga bisa terbentuk bank yang ada pada saat ini.

2.1.1 Sejarah Perbankan Indonesia

Menurut Bank Indonesia (2007) awal perkembangan bank di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan VOC. Setelah mengalami beberapa kali kebangkrutan, akhirnya muncullah *De Javasche Bank* yang didirikan pada tahun 1828, yang merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal bank sentral Indonesia. Pada saat pemerintahan Jepang, hanya satu bank yang diakui yaitu Bank Rakyat Indonesia atau dalam Bahasa Jepangnya *Syomin Ginko*, sementara *De Javasche Bank* dikuasai oleh pihak Jepang. Tak lama setelah merdeka pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank*.

Di awal kemerdekaan Indonesia memiliki dua bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (Rizal, 2008). Selain itu terdapat empat bank swasta nasional, yaitu Bank Surakarta MAI di Solo, Bank Indonesia di Palembang, Bank Dagang Nasional di Medan, dan *Indonesian Banking Corporation* di Yogyakarta. Dengan meningkatnya rasa nasionalisme dan hasrat kemerdekaan dari rakyat di wilayah Federal, maka bermunculan pula bank-bank swasta nasional yang umumnya merupakan bank umum dan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan.

Pada masa orde baru pembangunan ekonomi dan nasional menjadi prioritas dalam mengendalikan masa depan bangsa Indonesia dan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penataan kembali perbankan dan BI merupakan prioritas bagi awal pelaksanaan program orde baru (Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2007). Guna meningkatkan mobilisasi dana masyarakat, BI memperkenalkan TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka) pada tahun 1970 yang melengkapi Deposito Inpres 1968. Selain itu, BI juga menyediakan dana yang

cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada tujuh bank pemerintah untuk membiayai program kredit dalam rangka mobilisasi dana masyarakat. BI dengan dukungan pemerintah pada tahun 1971–1972 melaksanakan kebijakan Program Penertiban Bank Swasta Nasional dengan sasaran untuk mengurangi jumlah bank swasta nasional dan memperkuat bank yang ingin tetap melanjutkan kegiatannya.

Menurut Bank Indonesia (2008), pada tahun 1988 pemerintah bersama BI melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972. Akibat Pakto 88, mulai 1997 perkembangan usaha perbankan menjadi lebih sulit dikendalikan.

“Awal Juli 1997, terjadi gejolak nilai tukar yang memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan upaya yang semula dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan kepada perbankan ternyata oleh masyarakat ditanggapi secara negatif dan mengakibatkan masyarakat melakukan penarikan dan pengalihan dana secara besar-besaran. Pemerintah yang kekurangan dana meminta bantuan kepada Bank Indonesia untuk melakukan program penjaminan terlebih dahulu, yang kemudian dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas melaksanakan program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank umum sekaligus melakukan upaya-upaya penyehatan perbankan. Kemudian ada program rekapitalisasi yang memberikan dampak meningkatnya BLBI untuk menutup kewajiban pemerintah kepada nasabah atau kreditur bank yang di-BBKU (Bank Beku Kegiatan Usaha).” (Mudjijah et al., 2019).

Ginting (2017) mengatakan untuk mewujudkan struktur perbankan yang stabil, BI bersama dengan pemerintah merancang Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam skenario API, bank-bank diwajibkan memperkuat permodalannya sesuai dengan lingkup operasionalnya yang berarti semakin luas lingkup operasionalnya maka semakin besar pula permodalan yang dipersyaratkan. Dengan demikian bank-bank kecil yang selama ini rentan terhadap gejolak terus didorong untuk menjadi besar. Setelah struktur perbankan mulai stabil, pemerintah mulai mencoba mengembangkan sistem, jasa, dan produk perbankan agar semakin kekinian.

2.1.2 Jasa dan Produk Perbankan

Bank Indonesia (2005) mengatakan produk bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. Menurut Novi (2017) ada beberapa jenis produk perbankan, yaitu pertama produk dana seperti tabungan, giro, dan deposito. Kedua produk kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kemudian ada produk jasa layanan seperti pengiriman uang, *letter of credits*, kliring, dan *money changer*.

Dengan adanya perkembangan teknologi maka bank mulai mengembangkan *electronic banking (e-banking)* untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi penggunaannya. Menurut Lestari (2016) *e-banking* adalah layanan yang memberikan kesempatan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *phone banking*, *Electronic Fund Transfer (EFT)*, *Electronic Data Capture (EDC)/Point of Sales (POS)*, *internet banking* dan *mobile banking*.

2.2 Mobile Banking (M-banking)

Berdasarkan penelitian oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (2018), pemanfaatan internet tertinggi digunakan untuk mencari harga, disusul membantu pekerjaan, informasi membeli, beli *online*, cari kerja, transaksi perbankan, dan jual *online*. Meskipun transaksi perbankan termasuk yang terendah, tetapi dengan meningkatnya sarana prasarana dan adanya perkembangan teknologi, maka muncullah banyak inovasi. Inovasi tersebut menghasilkan layanan yang disebut sebagai *mobile banking (m-banking)* yang sudah tidak asing lagi bagi kita.

M-banking merupakan salah satu bagian dari *financial technology*. Dewayanti et al. (2018) mengatakan jumlah pengguna internet yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan memengaruhi pertumbuhan pengguna layanan *m-banking*, karena dalam menggunakan layanan tersebut diperlukan jaringan internet dan *smartphone* yang mendukung. Salah satu pengertian *m-banking* adalah jenis layanan keuangan yang dapat diperoleh orang melalui berbagai *gadget* seperti ponsel atau tablet, di mana saja-kapan saja yang sangat bermanfaat untuk memeriksa informasi saldo, pembayaran tagihan listrik, dan sebagainya, serta hemat waktu dan mudah dalam penggunaannya (Khandelwal, 2019).

Menurut Ledesman (2019) ada beberapa layanan yang digunakan dalam *m-banking*, antara lain untuk mengirim uang antar rekening bank, untuk membayar tagihan telepon rumah, listrik, angsuran kredit rumah, mobil, motor, atau pinjaman apapun setiap bulan atau asuransi jiwa, asuransi mobil, dan transaksi non-finansial lainnya. Daily Social (2015) mengatakan penggunaan *m-banking* di Indonesia tergolong tinggi dengan total 80% responden menjawab sudah menggunakannya. Faktor lain yang membuat *m-banking* lebih diminati adalah menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan *SMS banking* karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan *SMS* yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan *SMS banking* (Sulfiana, 2020). Dengan meningkatnya pengguna *m-banking* berarti semakin banyak orang yang terhubung dengan lembaga perbankan dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan (Kemal, 2019).

Agar dapat membantu perkembangan *m-banking*, kita harus mengerti salah satu hal yang berkaitan dengannya, yaitu perbedaan individu (*individual differences*) (Kim et al., 2010). Penelitian ini mengukur *individual differences* berdasarkan *personal innovativeness* dan *mobile banking (m-banking) knowledge* karena berperan penting dalam sistem informasi.

2.3 Perbedaan Individu (*Individual Differences*)

Meskipun dalam generasi yang sama, seorang individu sangat berbeda dalam pengalaman, preferensi, dan perilaku yang berkaitan dengan teknologi (Wang et al., 2018). Dalam jurnalnya, Barak & Levenberg (2016) mengatakan individu yang berpikir fleksibel terbuka untuk ide-ide baru menunjukkan keberhasilan yang lebih besar dalam menghadapi perubahan kehidupan. Mereka memproses informasi baru dan menjelajahi lingkungan baru dengan mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Zmud (1979) mengenai pengaruh *individual differences* terhadap keberhasilan *management information system (MIS)* menunjukkan bahwa *individual differences* mempengaruhi keberhasilan *MIS* meskipun belum diketahui mengenai hubungan spesifik yang terlibat.

Individual differences sendiri memiliki pengertian karakteristik psikologis yang membedakan satu orang dari orang lain dan dengan demikian membantu untuk mendefinisikan individualitas setiap orang (Williamson, 2018). Dalam jurnalnya, Suryandari (2002) membedakan *individual differences* menjadi tiga kelompok, yaitu pertama demografi yang mencakup jenis kelamin, umur, pengalaman, dan pendidikan.

Kedua adalah kepribadian yang menggambarkan perasaan atau emosi mengenai sesuatu. Ketiga cara berpikir yang menunjukkan cara seseorang dalam mencari, menganalisa, mengevaluasi, dan menginterpretasikan data.

Suryandari (2002) mengatakan *individual differences* mempengaruhi seseorang untuk terus meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi. Secara tidak langsung hal ini akan berdampak positif terhadap literasi keuangan karena seorang individu akan terus memperbaharui informasi menggunakan teknologi mengenai keuangan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Penelitian ini mengukur *individual differences* berdasarkan *personal innovativeness* dan *mobile banking (m-banking) knowledge* karena berperan penting dalam sistem informasi (Chen et al., 2000).

2.3.1 Personal Innovativeness (PIN)

Dalam jurnalnya, Lu et al. (2005) mengatakan sudah sejak lama diakui bahwa individu yang sangat inovatif adalah pencari informasi aktif tentang ide-ide baru dan individu dengan inovasi pribadi yang lebih tinggi diharapkan untuk mengembangkan keyakinan yang lebih positif tentang teknologi. Masih banyak individu yang kurang memiliki keahlian mengenai layanan *m-banking* terbaru tentu akan memberikan dampak dengan adanya suatu inovasi yang akan mempengaruhi keinginan untuk menggunakan suatu teknologi (Kim et al., 2010).

Personal innovativeness dapat didefinisikan sebagai individu yang bersedia mengambil resiko dan memiliki kemauan untuk menggunakan sistem informasi, suatu gagasan atau ide yang masih baru, serta mampu mengatasi tingkat ketidakpastian yang tinggi (Agarwal & Prasad, 1998).

Peneliti sistem informasi mempercayai bahwa individu akan dapat terus menemukan dan mengadopsi fitur baru setelah suatu sistem diadopsi, dimana dalam hal ini memberi individu kesempatan untuk menunjukan inovasi mereka dalam perilaku adopsi dan penelitian lainnya menemukan perilaku setelah mengadopsi adalah penerimaan sistem informasi yang cepat (Lu, 2014). Indikator untuk mengukur *personal innovativeness* adalah ingin mengetahui cara menggunakan teknologi baru, ingin menggunakan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhannya, mencoba bereksperimen dengan teknologi baru (Thakur et al., 2016).

2.3.2 Mobile Banking Knowledge (MBK)

M-banking menggunakan infrastruktur telepon seluler yang berkembang pesat saat ini dan berpotensi untuk digunakan dengan cepat dan terjangkau untuk memperluas akses ke layanan keuangan di antara orang-orang yang tidak memiliki rekening bank (World Bank, 2006). OJK (2015) mengatakan *m-banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau *smartphone*.

Menurut Kim et al. (2010), pengguna yang memiliki pengetahuan luas tentang pembayaran dalam hal pengungkapan informasi pribadi kepada vendor seluler, mereka akan mendapatkan pengalaman menggunakan transaksi *m-banking* dengan lebih mudah daripada mereka yang kurang memiliki pengetahuan tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Alsamydai (2014), bahwa pengetahuan pelanggan yang terbatas tentang layanan *m-banking* memiliki dampak pada manfaat yang dirasakan dari *m-banking*.

2.4 Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan literasi dasar yang berisi pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup sekaligus kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan (Kemendikbud, 2017). OECD (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan resiko keuangan dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well-being*) individu dan masyarakat, serta berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Di sisi lain, Amidjono (2016) mengatakan literasi keuangan merupakan suatu rangkain proses atau aktivitas untuk memperluas pengetahuan, kompetensi dan keterampilan dari seseorang ataupun kelompok yang lebih luas sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih baik.

OJK (2017) mengatakan literasi keuangan tidak terbatas pada pengertian pengetahuan, keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan semata, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan diyakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif. Pada negara berpendapatan tinggi, literasi keuangan dianggap sebagai pelengkap dari perlindungan konsumen, sedangkan pada negara berpendapatan rendah, jangkauan keuangan jauh lebih terbatas (Sanistasya et al., 2019). Peranan literasi keuangan yang akan membantu negara berkembang untuk lebih fokus meningkatkan akses keuangan serta pelayanan keuangan. Dengan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar keuangan yang baik maka ketika membuat keputusan tentang keuangan tidak mengalami masalah di masa depan sehingga mampu menunjukkan perilaku keuangan yang sehat untuk menentukan prioritas kebutuhan bukan hanya sekedar keinginan.

Tingkat literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dinyatakan oleh OJK (2017), hanya 29,7% masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (*well literate*). Kesulitan keuangan dapat terjadi bukan hanya karena minimnya pengetahuan, tapi dapat dipengaruhi oleh salahnya tindak pengelolaan keuangan itu sendiri. Pengelolaan keuangan yang tepat harus didukung oleh literasi keuangan yang baik. Berapapun tingginya tingkat pendapatan seseorang, tanpa pengelolaan yang tepat maka keamanan keuangan akan sulit dicapai (Anugrah, 2018).

Prinsip dasar literasi keuangan menurut Kemendikbud (2017), yaitu:

1. Keutuhan: unsur-unsur literasi keuangan sejalan dengan lima literasi dasar yang lain.
2. Inklusif: merangkul semua pihak dengan terbuka dan setara (membuka kesempatan atau peluang yang berasal dari pihak lain).
3. Partisipatif: melibatkan dan memanfaatkan berbagai pemangku kepentingan literasi keuangan, dan berbagai sumber daya yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan.
4. Kesesuaian perkembangan psikologis, sosial, dan budaya: bahan-bahan, program, dan kegiatan literasi keuangan selaras dengan perkembangan individu, perkembangan sosial, dan budaya yang melingkupi individu.
5. Keberlanjutan: seluruh program, kegiatan, dan hasilnya harus berlanjut dan saling menopang.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK (2017), tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama *sufficient*

literate (67,8 %), yaitu penduduk yang memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Kedua *well literate* (29,7 %), yaitu penduduk yang memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Ketiga *less literate* (2,09 %), yaitu penduduk yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Keempat *not literate* (0,41%), yaitu penduduk yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan diadopsi dari beberapa penelitian yang menggabungkan dimensi keterampilan pengetahuan, sikap, dan perilaku untuk membuat keputusan keuangan sehingga pada akhirnya mencapai keuangan pribadi yang benar. Definisi tersebut menunjukkan berbagai dimensi dan kemungkinan pengukuran literasi keuangan terkait *financial knowledge*, *financial behavior*, dan *financial attitudes* (OECD, 2016). Menurut Wiharno (2018), literasi keuangan merupakan kombinasi dari pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan. Untuk pengembangan penelitian ini maka konsep literasi keuangan dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan.

2.4.1 Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

Pengetahuan keuangan (FK) adalah pemahaman istilah dan konsep keuangan yang diperlukan untuk digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat seperti tentang inflasi, tingkat pengembalian, sarana investasi, dan manajemen resiko (Wiharno, 2018).

“Pengetahuan keuangan mengacu pada apa yang diketahui individu tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan tingkat pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi. Pengetahuan keuangan tidak hanya membantu individu menggunakan uang secara bijak, tetapi membantu individu yang sering dihadapkan dengan situasi *trade-off* dimana individu dipaksa keadaan untuk mengorbankan kepentingan seseorang demi kepentingan orang lain.” (Pradiningtyas & Lukiasuti, 2019).

Seorang individu dengan tingkat pengetahuan keuangan yang tinggi mungkin tidak selalu memiliki persepsi diri yang positif tentang tingkat

pengetahuannya mengenai pengelolaan keuangan mereka. Namun dilain sisi, dengan adanya pengetahuan keuangan dapat mempengaruhi perilaku keuangan secara positif seperti membayar tagihan tepat waktu, memiliki tabungan dan investasi, kemampuan untuk mengelola kartu kredit secara bijak, memiliki rencana pensiun yang tepat, partisipasi yang lebih besar di pasar keuangan, dan diversifikasi yang lebih baik (Lajuni et al., 2018).

2.4.2 Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Menurut Tang & Baker (2016), memiliki evaluasi positif terhadap diri sendiri mungkin juga penting bagi individu untuk memulai dan bertahan dengan proses manajemen keuangan yang menakutkan. Memiliki pengetahuan keuangan memang penting tapi tidak mencukupi untuk menghasilkan perilaku keuangan yang baik. Dalam bukunya, Baker et al. (2017) menuliskan adanya hubungan antara perilaku dan emosional yang mempengaruhi berbagai pengambilan keputusan mengenai keuangan, layanan, produk, dan pasar.

Lajuni et al. (2018) telah mengakui seberapa baik untuk secara efektif memprediksi proses keuangan dan ekonomi tergantung pada bagaimana kita dapat memahami sikap dan perilaku masyarakat terhadap keuangan, serta karakteristik berbagai kelompok sosial yang berbagi pandangan dan perilaku yang sama.

2.4.3 Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

Sikap keuangan (FA) didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip keuangan untuk menciptakan dan memelihara nilai melalui pembuatan keputusan dan pengelolaan sumber daya sebaik-baiknya (Wiharno, 2018). Sikap keuangan adalah kecenderungan psikologis yang diekspresikan ketika mengevaluasi praktik manajemen keuangan yang direkomendasikan dengan beberapa tingkatan kesepakatan dan ketidaksepakatan (Pradiningtyas & Lukiausti, 2019). Sikap terhadap uang merupakan bentuk persepsi dari individu mengenai uang berdasarkan pengalaman dan keadaan yang pernah dialami dalam hidupnya.

Anugrah (2018) mengatakan seseorang yang paham dengan kondisi keuangannya dan mampu menyikapi uang yang dimilikinya menunjukkan bahwa seseorang tersebut mempunyai sikap keuangan yang baik maka dengan pengelolaan keuangan yang baik nantinya tidak akan terjebak pada sikap yang berlebihan. Memahami aspek kepribadian dalam mengelola keuangan

dibutuhkan untuk sukses mengelola keuangan karena setiap tipe kepribadian berbeda dalam cara mengelola keuangannya (Humaira & Sagoro, 2018).

2.5 Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

Inklusi keuangan (FI) adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2016a). Dengan adanya peningkatan pada inklusi keuangan, Kitakogelu (2018) mengatakan individu yang sebelumnya dikecualikan secara finansial akan dapat berinvestasi dalam pendidikan, menabung, dan meluncurkan bisnis, dan hal ini dapat berpengaruh pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Hartati & Azwar (2017) mengatakan seberapa besar kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses dan menggunakan jasa keuangan, mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam ekonomi tersebut. Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan data makro ekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. IKI terdiri dari tiga variabel utama, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) (Bank Indonesia, 2013).

2.5.1 Manfaat dan Indikator Inklusi Keuangan

Beberapa alasan seperti *price barrier*, *information barrier*, dan *channel barrier* dapat menyebabkan masyarakat masuk dalam kategori *unbanked*, maka dibutuhkan manfaat dari inklusi keuangan. Adapun manfaat inklusi keuangan yaitu mengurangi kesenjangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan, meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan memberikan potensi pasar baru bagi perbankan (Bank Indonesia, 2013).

Menurut Kemenkeu (2016), indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi, yaitu pertama akses yang merupakan kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya. Indikatornya antara lain:

1. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.

2. Jumlah mesin *ATM/EDC/Mobile POS* lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
3. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.

Kedua penggunaan, yaitu mengukur kemampuan penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan. Indikator ini terdiri dari:

1. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat.
2. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai.
3. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk.
4. Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa.

Ketiga kualitas dari layanan perbankan, yaitu mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikatornya adalah:

1. Indeks literasi keuangan.
2. Jumlah pengaduan layanan keuangan.
3. Persentase penyelesaian layanan pengaduan

2.5.2 Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Pemerintah mencanangkan peningkatan indeks keuangan inklusif dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan lima pilar sebagai penyangga SNKI (Kemenkeu, 2016b). Bank Indonesia (2013) menyebutkan kelima pilar tersebut yaitu:

1. Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan.
2. Fasilitas keuangan publik merupakan strategi yang mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Pemetaan informasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk

menjadi layak dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal.

4. Kebijakan / peraturan yang mendukung agar program dapat terlaksana dengan baik
5. Perlindungan konsumen agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan.

2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.6.1 Dampak *Personal Innovativeness (PIN)* Terhadap Inklusi Keuangan (FI) di Jabodetabek

Belum banyak penelitian mengenai dampak *personal innovativeness* terhadap inklusi keuangan. Namun ada beberapa penelitian yang mengaitkan *personal innovativeness* dengan penggunaan *m-banking*. Penelitian untuk mengetahui hubungan antara *personal innovativeness* dengan penggunaan *m-banking* telah dilakukan oleh Kim et al. (2010) dan Lu (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. (2010) dan Lu (2014) menemukan bahwa *personal innovativeness* sebagai penentu penting dari *perceived ease of use* dari *m-banking* memiliki hasil yang signifikan dalam mempengaruhi penggunaan *m-banking*. *M-banking* sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan inklusi keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan asumsi yang penulis jelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

H₁: personal innovativeness memiliki dampak positif terhadap inklusi keuangan di Jabodetabek

2.6.2 Dampak *M-banking Knowledge (MBK)* Terhadap Inklusi Keuangan (FI) di Jabodetabek

Belum banyak penelitian mengenai dampak *m-banking knowledge* terhadap inklusi keuangan. Namun ada beberapa penelitian yang mengaitkan *m-banking knowledge* dengan penggunaan *m-banking*. Penelitian untuk mengetahui hubungan antara *m-banking knowledge* dengan penggunaan *m-banking* telah dilakukan oleh Alsamydai (2014) dan Sun & Havidz (2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Alsamydai (2014) dan Sun & Havidz (2019) menemukan bahwa *m-banking knowledge* sebagai penentu penting dari

perceived ease of use dari *m-banking* memiliki hasil yang signifikan dalam mempengaruhi penggunaan *m-banking*. *M-banking* sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan inklusi keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan asumsi yang penulis jelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

H₂: m-banking knowledge memiliki dampak positif terhadap inklusi keuangan di Jabodetabek

2.6.3 Dampak Pengetahuan Keuangan (FK) Terhadap Inklusi Keuangan (FI) di Jabodetabek

Pradiningtyas & Lukiasuti (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan memberikan hasil pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan karena orang-orang yang berpengetahuan akan memilih *tools* keuangan yang memudahkan mereka untuk melakukan transaksi dan investasi. Hal ini berarti pengetahuan keuangan berpengaruh pada inklusi keuangan karena orang-orang tersebut memiliki akses terhadap layanan keuangan.

Hutabarat (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat Jabodetabek memberikan hasil literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap inklusi keuangan. Literasi keuangan memiliki tiga komponen yaitu pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan sikap keuangan. Salah satu komponen ini, yaitu pengetahuan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Babych et al. (2018) menemukan bahwa pengetahuan keuangan mempengaruhi literasi keuangan, dan literasi keuangan mempengaruhi inklusi keuangan, dimana masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi akan lebih memperhatikan dan mengendalikan kondisi keuangan mereka.

Dalam penelitiannya, Grohmann et al. (2018) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan keuangan terhadap inklusi keuangan. Dengan pengetahuan keuangan yang baik, maka seorang individu dapat mengakses dan membuat keputusan keuangan dengan lebih baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan asumsi yang penulis jelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

H₃: pengetahuan keuangan memiliki dampak positif terhadap inklusi keuangan di Jabodetabek

2.6.4 Dampak Perilaku Keuangan (FB) Terhadap Inklusi Keuangan (FI) di Jabodetabek

Hutabarat (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat Jabodetabek memberikan hasil literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap inklusi keuangan. Literasi keuangan memiliki tiga komponen yaitu pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan sikap keuangan. Salah satu komponen ini, yaitu perilaku keuangan memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Babych et al. (2018) menemukan bahwa perilaku keuangan dan sikap keuangan belum tentu mempengaruhi literasi keuangan, tetapi perilaku keuangan dan sikap keuangan mempengaruhi inklusi keuangan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki perilaku dan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan asumsi yang penulis jelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

H₄: perilaku keuangan memiliki dampak positif terhadap inklusi keuangan di Jabodetabek

2.6.5 Dampak Sikap Keuangan (FA) Terhadap Inklusi Keuangan (FI) di Jabodetabek

Hutabarat (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat Jabodetabek memberikan hasil literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap inklusi keuangan. Literasi keuangan memiliki tiga komponen yaitu pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan sikap keuangan. Salah satu komponen ini, yaitu sikap keuangan memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Babych et al. (2018) melakukan penelitian dan menemukan bahwa perilaku keuangan dan sikap keuangan belum tentu mempengaruhi literasi keuangan, tetapi perilaku keuangan dan sikap keuangan mempengaruhi inklusi keuangan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki perilaku dan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pradiningtyas & Lukiastuti (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan memberikan hasil sikap

keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan, yang berarti semakin baik sikap yang dimiliki seseorang terhadap uang maka semakin baik pula pengelolaan keuangan pribadinya. Sikap keuangan yang dimiliki akan membantu orang-orang dalam menentukan tindakan dan perilaku mereka dalam hal keuangan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, penganggaran keuangan pribadi ataupun keputusan individu mengenai penyimpanan jangka panjang. Hal ini berarti sikap keuangan berpengaruh pada inklusi keuangan karena orang-orang tersebut memiliki akses terhadap layanan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan asumsi yang penulis jelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

H₅: sikap keuangan memiliki dampak positif terhadap inklusi keuangan di Jabodetabek

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *personal innovativeness*, *m-banking knowledge*, dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan belum banyak dilakukan sebelumnya. Berikut terangkum penelitian terdahulu mengenai *personal innovativeness*, *m-banking knowledge*, literasi keuangan, dan inklusi keuangan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Grohmann et al. (2018)	<i>Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Literasi keuangan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan karena permintaan akan jasa keuangan dalam bentuk literasi keuangan dan pasokan jasa keuangan penting untuk inklusi keuangan • Meningkatkan pengetahuan keuangan dapat berpengaruh baik terhadap inklusi keuangan
Hutabarat (2018)	Pengaruh literasi keuangan dan <i>financial technology</i> terhadap inklusi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat literasi keuangan masyarakat Jabodetabek berada pada taraf rata-rata 58,80% dan masih tergolong pada

	<p>keuangan pada masyarakat Jabodetabek</p>	<p>kelompok literasi keuangan yang rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat inklusi keuangan masyarakat Jabodetabek berada pada taraf rata-rata 64,86%, terdapat 46% masyarakat yang berada dibawah persentase rata-rata dan 54% masyarakat berada diatas rata-rata indeks inklusi keuangan. • Literasi keuangan dan financial technology memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan secara bersama-sama dan nyata. Peningkatan literasi keuangan akan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Semakin baik pengunaan financial technology akan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat pula. • Karakteristik masyarakat berdasarkan demografi, diperoleh hasil bahwa jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan memiliki pengaruh signifikan secara keseluruhan terhadap inklusi keuangan. Variabel jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan memiliki pengaruh nyata terhadap inklusi keuangan. Namun, pendapatan masyarakat tidak berpengaruh nyata terhadap inklusi keuangan.
Kemal (2019)	<p><i>Mobile banking in the government-to-person payment sector for</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengguna <i>m-banking</i> berarti semakin banyak orang yang terhubung dengan lembaga perbankan

	<i>financial inclusion in Pakistan</i>	<p>dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>M-banking</i> memberikan peluang untuk mencapai inklusi keuangan rumah tangga yang tidak memiliki rekening bank.
Kim et al. (2018)	<i>Mobile financial services, financial inclusion, and development: A systematic review of academic literature</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mobile financial service</i> dapat meningkatkan inklusi keuangan untuk populasi berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang. • Penggunaan perangkat seluler di negara-negara Afrika dan <i>mobile financial service</i> berpengaruh secara positif terhadap pendalaman keuangan dan aktivitas keuangan.
Kirana (2020)	Dampak Literasi Keuangan dan <i>Mobile Payment</i> Terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Jabodetabek	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan keuangan memiliki dampak positif dan signifikan secara parsial terhadap inklusi keuangan di daerah Jabodetabek. • Perilaku keuangan memiliki dampak positif dan signifikan secara parsial terhadap inklusi keuangan di daerah Jabodetabek. • Sikap keuangan memiliki dampak negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap inklusi keuangan di daerah Jabodetabek. • Kemanfaatan <i>mobile payment</i> memiliki dampak positif dan signifikan secara parsial terhadap inklusi keuangan di daerah Jabodetabek.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan <i>penggunaan mobile payment</i> memiliki dampak positif dan signifikan secara parsial terhadap inklusi keuangan di daerah Jabodetabek. • Pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, sikap keuangan, kemanfaatan <i>mobile payment</i>, dan kemudahan penggunaan <i>mobile payment</i> memiliki dampak positif secara simultan terhadap inklusi keuangan di daerah Jabodetabek.
Lajuni et al. (2018)	<i>Religiosity, financial knowledge, and financial behavior influence on personal financial distress among millennial generation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan keuangan mempengaruhi perilaku keuangan secara positif seperti membayar tagihan tepat waktu, memiliki tabungan dan investasi, kemampuan untuk mengelola kartu kredit secara bijak, memiliki rencana pensiun yang tepat, partisipasi yang lebih besar di pasar keuangan, dan diversifikasi yang lebih baik
Pradiningtyas & Lukiastuti (2019)	Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap <i>Locus of Control</i> dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pengetahuan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap <i>variabel locus of control</i> pada mahasiswa ekonomi perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B dikota Semarang. • Variabel sikap keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel <i>locus of control</i> pada mahasiswa ekonomi perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B dikota Semarang.

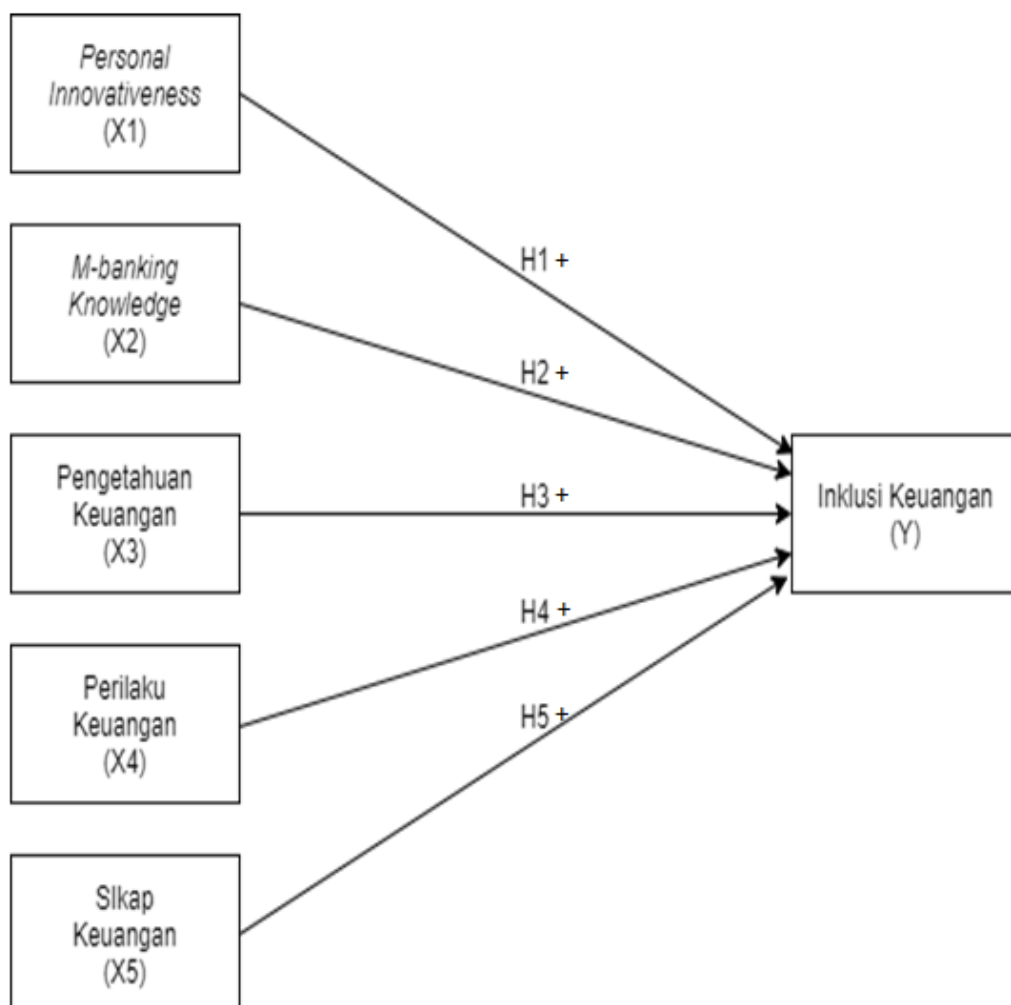
		<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pengetahuan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel perilaku pengelolaan keuangan pada mahasiswa ekonomi perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B di kota Semarang. • Ada pengaruh positif dari variabel sikap keuangan terhadap variabel perilaku pengelolaan keuangan pada mahasiswa ekonomi perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B di kota Semarang. • Pengaruh dari variabel <i>locus of control</i> adalah positif dan signifikan terhadap variabel perilaku pengelolaan keuangan pada mahasiswa ekonomi perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B di kota Semarang.
Sun & Havidz (2019)	<i>Factors Impacting the Intention to Use M-Payment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil empiris mengungkapkan bahwa di antara dua <i>individual differences</i>, hanya <i>m-payment knowledge</i> yang menentukan PEOU sedangkan <i>personal innovativeness</i> tidak. • <i>Compatibility</i> dan <i>convenience</i> berpengaruh signifikan terhadap PEOU.
Wiharno (2018)	Pengaruh <i>financial knowledge, financial behavior</i> , dan <i>financial attitude</i> terhadap <i>personal financial management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>financial knowledge, financial behaviour</i> dan <i>financial attitude</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan personal.

		<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>financial knowledge</i>, <i>financial behaviour</i> dan <i>financial attitude</i> secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen keuangan personal.
Zmud (1979)	<i>Individual Differences and MIS Success: A Review of the Empirical Literature</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis mengenai pengaruh <i>individual differences</i> terhadap keberhasilan MIS memiliki hasil yang positif.

Sumber: diolah oleh penulis

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Skema kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber: diolah oleh penulis